

Komunitas Pendidikan Tinggi Dan Pendampingan Gereja

Adrianus Meliala

Universitas Indonesia

*Adrianusmeliala@gmail.com

Abstrak. Tulisan ini membahas permasalahan tiga komunitas masyarakat Katolik Indonesia yang hidup dan terlibat di pendidikan tinggi. Ketiganya adalah lembaga pendidikan tinggi Katolik, dosen dan juga mahasiswa Katolik. Pembahasan diarahkan pada terdapatnya permasalahan khas dari masing-masing komunitas tersebut dan perlunya Gereja memiliki strategi komprehensif sehingga potensi komunitas Katolik di pendidikan tinggi tersebut dapat teraktualisasi menjadi nyata.

Kata kunci: Pendidikan Tinggi, Katolik, dosen, mahasiswa

1. Pendahuluan

Apabila pendidikan dasar dan menengah membantu individu dan masyarakat untuk berangkat dari situasi ketidaktahuan dan membawa menuju pada situasi kekinian, maka tugas dunia pendidikan tinggi amat berbeda. Pendidikan tinggi pada hakekatnya mengupayakan agar situasi kekinian berlangsung efisien, efektif, berdaya guna dan sekaligus mempersiapkan pembelajarnya siap menghadapi permasalahan masa depan.

Menyadari itu, baik strata pendidikan dasar dan menengah di satu sisi serta pendidikan tinggi di pihak lain tidak bisa menyebut diri lebih penting dibanding yang lain mengingat pada dasarnya suatu masyarakat sulit berkembang jika hanya memperhatikan dan mengurus pendidikan dasar dan menengah saja. Sebaliknya, pendidikan tinggi akan kehilangan input yang bermutu dan dalam jumlah yang cukup besar apabila masyarakat mengabaikan kualitas pendidikan dasar dan menengah.

Permasalahan yang biasa ditemui pada dua rumpun pendidikan ini memang cukup khas dan amat terkait dengan sifat pendidikan yang dilakukan. Pada pendidikan dasar dan menengah, terdapat persoalan bagaimana menjadikan pendidikan bisa berlangsung massal, ajeg dan dapat diakses oleh semua penduduk yang berada dalam kategori Wajib Belajar 12 tahun. Dalam kaitan itu, ketercukupan fasilitas pendidikan, keterjangkauan biaya serta ketersediaan pengajar menjadi isu yang amat penting. Itu semua menjadi tulang punggung (*backbone*) dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah agar tetap relevan dan aktual dengan permasalahan jamannya.

Sebaliknya, dunia pendidikan tinggi memiliki kelompok isu yang berbeda. Persoalan yang dihadapi bukan lagi membuat pendidikan tinggi berjalan massal dan dapat dijangkau semua orang. Sebaliknya, isunya adalah bagaimana membuat pendidikan tinggi mentransformasi kalangan masyarakat yang tertentu untuk menjadi profesional, ahli atau praktisi yang memiliki kemampuan analitis dan kecakapan teknis. Hingga manajerial Kalangan ini diharapkan akan menjadi pemimpin masyarakat, fasilitator perubahan atau bahkan pelaku perubahan itu sendiri di bidang masing-masing. Dalam kaitan itu, isu khas pendidikan tinggi adalah terkait kecanggihan (*excellence*) dan

kemutakhiran (*sophistication*) perihal ilmu yang diajarkan atau yang dikembangkan melalui kajian dan penelitian.

Di Indonesia, sayangnya, pendidikan tinggi masih dibebani dengan target yang mirip target pendidikan dasar dan menengah, yakni menjadikan pendidikan tinggi dapat diakses oleh sebanyak mungkin kalangan. Maka, bertumbuhanlah kampus-kampus dimana-mana. Lembaga pendidikan tinggi seperti universitas, sekolah tinggi, akademi, institut dan politeknik bertebaran hingga pelosok menawarkan berbagai program studi. 4500 lebih PTS di seantero Indonesia dewasa ini mencetak sekitar 1.5 juta wisudawan per tahun yang perlu diserap oleh pasar tenaga kerja jika tidak mau menimbulkan pengangguran terdidik. Terlepas dari kualitasnya, mereka yang keluaran universitas itu pun mengisi berbagai posisi dan peran di kelas menengah di masyarakat dan membawa warna bagi masyarakat. Pada masanya kelak, mereka menjadi penentu masa depan masyarakat, bangsa dan negaranya.

Jumlah kampus yang banyak dan bertebaran di kabupaten-kabupaten itu kemudian berkorelasi positif dengan mutu pendidikan tinggi yang tidak terjaga. Persoalan pertama-tama dimulai dari pengajar yang tidak mencukupi secara jumlah, secara kualifikasi dan juga secara kompetensi. Di atas kertas, persyaratan yang ditetapkan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud sudah cukup berat perihal berapa jumlah dosen *home base* yang harus dimiliki suatu program studi, berikut kualifikasi akademik dan kepangkatan akademiknya. Jika saja ketentuan itu diterapkan secara tegas, diduga kuat banyak program studi akan tutup.

Selanjutnya, terdapat persoalan infrastruktur pendidikan: terbatasnya laboratorium, bengkel kerja, klinik serta preparat, ditambah lagi keterbatasan jaringan internet. Hal tersebut menjadikan banyak program studi dari rumpun kesehatan dan teknik sebenarnya berlangsung dibawah standar. Alhasil, yang banyak dibuka adalah program studi dari rumpun sosial-humaniora yang kini lulusannya telah jenuh.

Terakhir, terkait *intake* atau mahasiswa. Pendidikan tinggi dimana-mana tidak mungkin didatangi oleh semua lulusan sekolah menengah. Sekolah dasar dan menengah seyogyanya secara sistematis menyaring mereka yang bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Bagi yang tidak bisa, tidak mampu atau tidak mau melanjutkan ke pendidikan tinggi, tersedia berbagai pendidikan vokasional (yang juga diselenggarakan oleh pendidikan tinggi) atau langsung masuk ke pasar kerja. Indonesia kembali menyajikan gambaran yang berbeda dimana lulusan sekolah menengah bisa menjadi mahasiswa hampir tanpa hambatan.

Tulisan ini selanjutnya akan fokus pada permasalahan yang dihadapi komunitas dari Masyarakat Katolik Indonesia yang terlibat atau terkait dengan pendidikan tinggi di Indonesia, entah sebagai pengurus lembaga pendidikan tinggi katolik, sebagai dosen atau sebagai mahasiswa. Mereka juga menghadapi persoalan yang sama dengan elemen besar masyarakat Indonesia pada umumnya. Fokus ditujukan pada kebutuhan kalangan ini untuk secara intens didampingi oleh Gereja.

2. Metode

Paper ini menggunakan metode kualitatif berupa observasi mengenai lembaga pendidikan Katolik serta menggunakan teknik studi pustaka terkait dengan proses pergerakan komunitas pendidikan tinggi katolik dan bagaimana pendampingan gereja terhadap lembaga-lembaga tersebut.

Data-data berupa observasi, perjumpaan, pengalaman penulis dengan lembaga-lembaga ini menjadi modal kuat dalam menentukan dan menetapkan data yang diambil. Data-data lewat model observasi dan kemudian studi dokumen, kemudian dirangkum menjadi data-data yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

Data-data tersebut yang sudah dirangkum kemudian dianalisis menjadi hasil dan pembahasan dari paper ini, meliputi kelembagaan, dosen, dan mahasiswa.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Permasalahan Masyarakat Katolik dan Pendidikan Tinggi

Seperti halnya elemen-elemen masyarakat lainnya, Masyarakat Katolik Indonesia terlibat secara integral dalam dunia dan permasalahan pendidikan tinggi. Masyarakat Katolik Indonesia, misalnya, terasosiasi dengan berbagai perguruan tinggi Katolik baik yang berstatus swasta ataupun milik negara. Sebagian dosen beragama Katolik ada yang bekerja di perguruan tinggi Katolik tersebut namun lebih banyak lagi yang tidak. Demikian pula para pembelajar atau mahasiswa Katolik, tersebar di berbagai perguruan tinggi Katolik dan, lebih-lebih lagi, perguruan non-Katolik.

Menyadari itu, maka bisa dimunculkan beberapa pertanyaan sebagai berikut: Apakah Kekatolikan dari mahasiswa ataupun dosen tidak menjadi penghalang atau penghambat untuk maju dalam karier dan/atau berhasil dalam studi? Apakah penyebutan Katolik sebagai pemilik suatu lembaga pendidikan tinggi, menjadi faktor yang mendorong atau menghambat kemajuan dari lembaga tersebut?

Jika menjadi penghambat, maka apa yang perlu dan bisa dilakukan oleh Gereja Katolik Indonesia untuk membantu komunitas yang diharapkan menjadi *driver* bangsa ini? Jika memang tidak menjadi penghambat, bahkan menjadi pendorong, maka apa yang dilakukan oleh Gereja Katolik selama ini baik pada masa lalu, sekarang dan masa depan untuk tetap mempertahankan situasi tersebut?

Sebenarnya, aspek primordial yang terkait dengan latar belakang seseorang atau lembaga tidak seharusnya dikenal atau dipertimbangkan dalam rangka suatu keputusan atau kebijakan, apalagi menyangkut pendidikan tinggi. Sudah menjadi suatu komitmen bangsa bahwa suku, agama, ras, ideologi politik, kepentingan golongan dan orientasi seksual tidak boleh menjadi pertimbangan, apalagi menjadi *affirmative consideration* dalam rangka pembuatan kebijakan, demikian juga dalam rangka bertindak.

Namun demikian, pada tataran empiris, hal tersebut kerap kali tak terhindarkan. Mau tak mau, hal-hal tersebut perlu diperhitungkan. Setidak-tidaknya hal itu mencegah kita berpikir naif karena menganggap hal-hal tersebut tidak ada dan tidak berpengaruh apa-apa. Khususnya ketika dewasa ini Politik Identitas tengah ramai digalakkan, sungguh membuat kita harus memperhitungkan perihal Kekatolikan sebagai hal yang memberatkan atau tidak.

Oleh karena itu, amat strategik untuk membahas bagaimana permasalahan komunitas Katolik yang terlibat atau terkait dengan pendidikan tinggi tersebut (yakni lembaga pendidikan tinggi Katolik, dosen dan mahasiswa Katolik), khususnya dikaitkan dengan bagaimana kebutuhan mereka terhadap pendampingan gereja.

Dengan memakai konsepsi “pendampingan”, pada dasarnya kita bisa menyepakati bahwa kehidupan dan permasalahan pendidikan tinggi pada dasarnya adalah aktivitas profan, organisatoris, akademis serta keilmuan, dimana tidak terkait dengan aspek spiritual. Namun demikian, mengingat yang menjadi subyek dan obyek pendidikan tinggi adalah manusia dengan segala kecenderungannya, maka upaya memelihara aspek psikologis dan batiniah melalui pendampingan rohani (dalam hal ini oleh Gereja kepada komunitas tertentu) tentu menjadi argumen yang dapat diterima.

Seiring dengan itu, perlu pula dielaborasi perihal bagaimana kebijakan serta sumberdaya yang telah diberikan oleh gereja guna mendampingi kalangan ini sebagai aset manusia bagi masa

depan gereja, khususnya Gereja Katolik Indonesia. Tentunya kita perlu menghindarkan pemahaman bahwa kekinian seseorang tidak ada hubungannya dengan masa lalunya (*somebody's nowadays has nothing to do with somebody's past*). Untuk itu, jika kita mengharapkan terdapatnya sejumlah umat yang mau terlibat dan siap mengemban kepemimpinan di 5 (lima) bidang awam di masyarakat yakni Liturgi,ewartaaan, Pelayanan, Persekutuan dan Kesaksian (dalam buku Komisi Kerasulan Awam KWI, 2006; 186), maka seyogyanya telah ada rencana aksi yang terstruktur dan sistematis dari KWI dan keuskupan-keuskupan untuk merealisasikannya.

Pendampingan terhadap kelembagaan juga relevan dilakukan mengingat suatu lembaga pendidikan tinggi Katolik merupakan wahana pengentasan bagi seorang pimpinan awam di masa depan. Bila wahana tersebut memiliki kualitas yang baik, maka baik pula mutu keluaran yang dihasilkan.

3.2.Kelembagaan

Terkait kelembagaan pendidikan tinggi, terdapat 28 Sekolah Tinggi (ada pula yang menyebut Perguruan Tinggi) Agama Katolik yang dikelola yayasan dan dimiliki keuskupan serta menjadi binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama RI. Sebagai contoh Sekolah Tinggi Agama Katolik di Pontianak, di Makassar dan lain-lain.

Jika disebut “binaan”, sebenarnya ingin menunjukkan hubungan antara Ditjen Bimas Katolik Kemenag dengan berbagai perguruan tinggi agama Katolik itu yang bersifat longgar. Selain membantu pendanaan untuk membangun infrastruktur seperti bangunan dan pengadaan peralatan belajar, Ditjen Bimas Kemenag juga mendukung penyediaan honorarium pengajar serta beasiswa bagi mahasiswa.

Sejauh ini, baru Sekolah Tinggi Agama Katolik (STAKAT) Pontianak yang dinegerikan. Pasca penegerian, sekolah tinggi ini melesat berkat pembangunan gedung baru serta berbagai fasilitas belajar-mengajar baru lainnya yang berasal dari dana APBN. Bandingkan dengan Institut Agama Islam Negeri ataupun Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, dimana statusnya kini sama dengan perguruan tinggi negeri, dan kini jumlahnya bertaburan dimana-mana. Fakta tersebut tentu menyedihkan.

Mengingat bahwa pendidikan Katolik sejak dulu dianggap unggulan, mengapa baru 1 (satu) yang statusnya dinegerikan? Padahal, sering muncul keluhan bahwa PTAK non-negeri tersebut pada umumnya mengalami kesulitan keuangan mengingat ketidakmampuan siswa membayar biaya pendidikan yang tinggi, subsidi dari keuskupan tidak besar dan dukungan dana masyarakat juga tidak bisa diharapkan. Guna menghindari kekurangan mahasiswa maka biaya pendidikan diturunkan guna menarik minat mahasiswa yang, diduga kuat, adalah orang yang sudah gagal di Seleksi Nasional Masuk PTN (SNMPTN), gagal seleksi di sekolah kedinasan ataupun di berbagai perguruan tinggi swasta yang lebih kompetitif terkait mutu. Pengelolaan dana pendidikan yang minim menjadikan dosen tidak bisa dibayar secara baik, fasilitas kampus tidak bisa diperbaiki (apalagi ditambah), serta kesempatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bisa dikatakan barang yang langka.

Dalam hal ini bisa dirujuk Kanon 809 bahwa Majelis Waligereja hendaknya berusaha agar, jika mungkin dan berguna, didirikan universitas-universitas atau setidaknya-fakultas-fakultas yang tersebar secara baik di wilayah itu; dalam universitas dan fakultas itu hendaknya dikembangkan dan diajarkan pelbagai mata kuliah, dengan tetap menghormati otonomi ilmiah dan dengan mengingat ajaran Katolik. (dalam H. Sumarjo, 2020)

Menyangkut hal ini, terlihat ambivalensi gereja. Pada satu sisi mengharapkan lembaga pendidikan tinggi di keuskupannya berjalan baik, membuahkan lulusan yang membawa dampak

positif bagi masyarakat serta, kalau bisa, menguntungkan. Namun pada sisi lain gereja tidak menginginkan situasi berbagi atau bertukar dengan negara. Maka, ketika kepemilikan dan pengendalian sepenuhnya dipegang oleh keuskupan cq. yayasan, resiko terkait mutu dan sebagainya juga harus ditanggung sendiri.

Bagaimana situasi dengan Perguruan Tinggi Swasta Katolik yang tidak seberuntung PTAK dimana sepenuhnya mengandalkan mekanisme pasar. Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Widya Mandala Madiun, Universitas Soegijopranoto Semarang atau Universitas Sanata Dharma Yogyakarta adalah beberapa contoh perguruan tinggi yang mampu *survive* dan bahkan menonjol di kalangan sesama PTS. Namun demikian, terdapat pula universitas Katolik yang pernah jaya namun kemudian menurun.

Berbagai perguruan tinggi Katolik ini kemudian membentuk Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (atau APTIK) yang salahsatu upayanya adalah membuat standar antar berbagai perguruan tinggi Katolik tersebut. Kelihatannya, APTIK lebih fokus pada pemeliharaan atau peningkatan kualitas kurikulum dan sumberdaya manusia pengajar ketimbang manajemen lembaga.

Menurut penulis, ini titik yang menarik. Sama-sama Katolik, sama-sama didampingi secara ketat oleh para klerus, namun mengapa ada lembaga pendidikan katolik yang menurun kiprahnya? Apakah ada situasi salah urus? Keterlibatan gereja dalam manajemen lembaga pendidikan tinggi perlu dipastikan menjadi faktor yang *men-drive* yayasan agar menjalankan lembaga tersebut dengan kualitas tata kelola yang baik.

Jika pendampingan berkonotasi interaksi individual, maka saat ditarik ke level kelembagaan, maka bisa berarti bagaimana Gereja mengakomodasi ketika suatu lembaga pendidikan tinggi, khususnya yang non-Katolik, membutuhkan seorang imam sebagai pastor mahasiswa, membutuhkan dosen-dosen Agama Katolik atau berbagai kebutuhan lainnya dalam rangka hidup rohani komunitas yang bernaung di bawah lembaga tersebut.

Bisakah pendampingan juga diarahkan pada kemungkinan gereja mendukung dan menopang cita-cita pembangunan lebih banyak lagi universitas Katolik swasta atau bahkan universitas Katolik negeri? Dukungan formal Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) misalnya bukan tak mungkin bernilai kolateral yang tinggi di mata negara yang lalu bisa mengalokasikan dana APBN untuk pembangunan universitas Katolik negeri pertama di Indonesia.

3.3.Dosen

Berbicara tentang dosen dan komunitas dosen, untuk sementara tidak bisa dilepaskan dari tempat dimana mereka berada. Sebagian besar dosen beragama Katolik dapat ditemukan di lembaga pendidikan tinggi Katolik baik yang sepenuhnya swasta maupun yang didukung oleh negara.

Untuk kalangan ini, tentunya tidak ada masalah dari sisi dukungan komunitas yang semuanya orang Katolik maupun pendampingan pastoral dari gereja. Di kampus-kampus perguruan tinggi ini, di setiap penjuru ada salib, patung Bunda Maria dan kutipan Injil di dinding. Persoalan bahwa para dosen katolik setempat malah tidak mau atau malas mengadakan misa kampus atau pendalaman iman bersama di kampus, itu tentu persoalan lain.

Yang mengkhawatirkan adalah dosen Katolik yang bekerja di perguruan tinggi non-Katolik. Ada yang relatif besar jumlahnya seperti di UI. Namun jauh lebih banyak lagi kampus-kampus dimana kehadiran dosen beragama Katolik hanya terbilang sebelah jari tangan saja. Bahkan kurang. Data total mereka tidak diketahui.

Tidak usah bicara dulu tentang kemungkinan mereka dimarjinalkan selaku minoritas. Juga tidak usah bicara tentang kemungkinan mereka dihambat karier, jabatan atau capaian akademiknya. Walau kemungkinan-kemungkinan itu ada, satu hal yang pasti adalah bahwa para dosen itu pasti kesepian. Mereka kesulitan berbagi secara rohani dengan sesama rekan seiman. Untuk mengadakan sembahyangan, apalagi misa, kemampuan mereka sangat terbatas.

Pada konteks inilah nampaknya pendampingan pastoral gereja menjadi penting untuk diadakan. Gereja perlu menyapa mereka yang sendirian. Sebaliknya, jangan hanya menyapa mereka yang memang sejak awal sudah berada dalam kerumunan atau bahkan populasi besar sebagaimana terdapat di beberapa PTN besar seperti UI maupun di PT Katolik pada umumnya.

Caranya bagaimana? Menurut penulis, keuskupan perlu menugaskan imamnya untuk khusus berpastoral untuk konteks pendidikan tinggi guna menemani para dosen yang bekerja di perguruan tinggi non-Katolik. Apabila imam tersebut juga menjadi pengajar mata kuliah Agama Katolik, misalnya, tentunya ideal sekali. Namun yang terpenting disini adalah, adanya imam yang mampu berkomunikasi dengan “bahasa” dosen yang tak lain seputar Beban Kerja Dosen, Publikasi Scopus, Bahaya Plagiarisme dan sebagainya. Disebutkan dalam Dokumen Konsili Vatikan II, 1965, tentang Pendidikan Kristen (*Gravissimum Educationis*), khusus pada Artikel 10 tentang Pendidikan Tinggi bahwa Kaum muda yang berbakat lebih tinggi dilingkungan universitas katolik atau universitas lain, yang nampak cocok untuk menjadi dosen atau menjalankan penelitian-penelitian, hendaknya diusahakan perkembangannya secara istimewa, dan diarahkan untuk menunaikan tugas mengajar.

Sejauh ini, beberapa keuskupan terlihat sudah mulai memberikan perhatian. Komisi Pendidikan KAJ, misalnya, sudah beberapa kali mengadakan misa ataupun seminar yang dikhususkan bagi dosen-dosen dari perguruan tinggi non-Katolik. Kehadiran Ikatan Dosen Katolik Indonesia (IKDKI), dalam hal ini, juga dapat dilihat sebagai gerakan yang dilakukan oleh sesama dosen untuk saling berhimpun dan saling mendukung. Gereja tetap perlu mendampingi inisiatif ini khususnya pada masa-masa belianya.

3.4. Mahasiswa

Permasalahan mahasiswa Katolik agak mirip dengan permasalahan dosen. Mereka yang kuliah di perguruan tinggi Katolik tentu tidak perlu dipermasalahkan dari sisi kehidupan rohani serta pendampingan pastoral. Komunitas ini boleh dibilang berkecukupan bahkan mewah perihal hal tersebut.

Yang bermasalah adalah mahasiswa Katolik yang kuliah di perguruan tinggi non-Katolik. Jika jumlah mereka banyak, ini juga lumayan. Mahasiswa yang aktif, alumni atau dosen bisa berinisiatif mengumpulkan mereka, membuat semacam komunitas dan mengadakan aktivitas rohani bersama secara sesekali. Yang repot adalah, apabila jumlah mereka hanya belasan atau bahkan berbilang jari. Data mengenai mereka tidak diketahui. Siapa yang memperhatikan mereka? Siapa yang mendampingi mereka?

Sejauh ini kita mengenal Paroki Mahasiswa. Di lokasi dimana dijadikan Paroki Mahasiswa, banyak berkumpul mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Walau disebut “paroki”, apakah pada hakekatnya sama atau mirip dengan paroki teritorial? Kelihatannya tidak. Jauh di bawah itu. Jika paroki mengasosiasikan adanya sejumlah umat yang berada dalam suatu wilayah tertentu, dan kemudian mengorganisir diri dalam suatu “rumah tangga”, maka Paroki Mahasiswa tidak mempergunakan jalan berpikir itu. Paroki memang bukan terutama merupakan struktur wilayah atau bangunan, melainkan lebih-lebih didirikan di atas kenyataan teologis sebab ia merupakan persekutuan ekaristi (dalam buku Komisi Kerawam KWI, 2013; 105). Ini agak berbeda dengan

pengertian sehari-hari bagi mahasiswa yang melihat Paroki Mahasiswa sebagai suatu pusat kegiatan (*center of activity*) dimana mahasiswa dari berbagai institusi berkumpul, mengadakan berbagai kegiatan dengan didampingi oleh imam yang ditugaskan untuk itu.

Untuk sementara, keberadaan pusat tersebut bisa menjadi solusi yang baik bagi mahasiswa yang “sendirian” alias yang hanya segelintir saja mahasiswa Katolik di kampus tersebut. Haus dengan teman dan pendampingan menjadikan mereka bisa berlama-lama menghabiskan waktu di lokasi dimana mereka bertemu rekan sebaya plus seiman pula. Walau demikian, terkait dengan “warna” dan aktivitas pusat tersebut nampaknya tergantung pula pada kecenderungan pastor mahasiswa yang bertugas. Beruntung jika sang pastor senang dengan model pendampingan sebaya, yang dianggap pas dengan kebutuhan mahasiswa (dalam buku 25 Tahun Wisma Sahabat Yesus, 2014; 38-40). Terlepas dari itu, penting untuk dipertanyakan setelah itu apa lagi?

Terdapat kesan penulis Gereja belum memiliki strategi yang intens, lengkap dan kongkrit terkait mahasiswa Katolik. Menyadari bahwa mereka adalah komunitas yang anggota-anggotanya tinggal selangkah menuju lapangan pekerjaan, menuju gerbang perkawinan dan pembentukan keluarga, maka adalah strategis bagi gereja mendampingi mereka dengan suatu kegiatan pastoral yang khusus dan khas, lebih dari apa yang sudah dilakukan dewasa ini.

Jika kembali mengacu pada dokumen Konsili Vatikan II yang telah dikutip di atas, kembali disebutkan bahwa Konsili menganjurkan agar universitas-universitas Katolik tidak hanya berkembang dalam jumlah mahasiswanya tetapi juga mutunya. Gereja perlu memberikan reksa pastoral bagi para mahasiswa yang berada di universitas bukan Katolik, melalui para imam, religius, dan awam yang disiapkan dengan cermat. Gereja juga perlu memberi perhatian demi terselenggaranya studi lanjut bagi mereka yang berbakat (dalam H. Sumarjo, 2020).

Penulis berpendapat, gereja masih berada di persimpangan jalan terkait pendampingan terhadap orang muda antara yang berbasis usia (Bina Iman Anak, Remaja Katolik, Muda-Mudi Katolik, Pemuda Katolik), berbasis status akademik (Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Ikatan Sarjana Katolik) maupun berbasis karier (Karyawan Muda Katolik). Kalau mau menambah dengan organisasi berbasis karya liturgis, maka Kelompok Putra Altar kemungkinan juga bisa disebut sebagai wadah orang muda Katolik mengasah diri.

Sejauh ini, berdasarkan pengamatan, mahasiswa Katolik membentuk KMK (Keluarga Mahasiswa Katolik) di kampus masing-masing. Sejauh ini, jika tidak didampingi, maka KMK akan cenderung menjadi kelompok dimana mahasiswa Katolik dapat mengisi waktu bersama-sama. Mereka amat beruntung jika di kampus tersebut terdapat Paguyuban Dosen Katolik yang aktif, demikian pula jika terdapat Ikatan Alumni Katolik.

Sungguh sayang jika segitiga mahasiswa-dosen-alumni ini dilewatkan atau dilupakan oleh Gereja untuk didampingi mengingat merupakan kekuatan yang besar dalam mempengaruhi wajah gereja ke depan.

4. Penutup

Tulisan ini telah membahas permasalahan tiga sub komunitas dari komunitas masyarakat Katolik yang hidup dan terlibat di pendidikan tinggi. Ketiganya adalah lembaga pendidikan tinggi Katolik, dosen dan mahasiswa. Pembahasan diarahkan pada perlunya Gereja memiliki strategi komprehensif sehingga potensi komunitas Katolik di pendidikan tinggi tersebut dapat teraktualisasi menjadi nyata.

Pada Sub Penutup ini, penulis membahas perihal apa persisnya yang dimaksud dengan strategi komprehensif.

Yang kemungkinan bisa dilakukan adalah membentuk Komisi Pendidikan Tinggi tingkat KWI dan diteruskan ke tingkat keuskupan dimana memfokuskan pada pendidikan tinggi dan permasalahannya. Ruang lingkup tugas komisi ini adalah menangani permasalahan kelembagaan menyangkut lembaga pendidikan tinggi Katolik demikian pula permasalahan akademik dan non-akademik dari dosen serta mahasiswa baik yang bertugas di lembaga pendidikan Katolik maupun, lebih-lebih lagi, di lembaga pendidikan non-Katolik. Komisi ini menjadi jembatan antara Komisi pendidikan dan Komisi Kepemudaan.

Termasuk dalam konteks permasalahan akademik adalah yang menyangkut permasalahan terkait riset, metode riset dan penggunaan hasil riset yang diperkirakan memiliki singgungan etik dan moralitas, dimana gereja perlu memperlihatkan posisi yang jelas guna difahami (dan kemudian dijalankan) oleh para akademisi Katolik. Komisi ini diharapkan juga memikirkan mengenai *student body* (besaran mahasiswa dan profil ilmu yang ditekuni) demikian pula *academic body* (besaran dosen dan profil ilmu yang dikuasai) dalam rangka memastikan kontribusi Masyarakat Katolik Indonesia bagi bangsa dan negara.

Jika komisi dimaksud tetap dianggap tidak perlu, maka penulis mengusulkan agar minimal ditunjuk delegatus yang berpikir tentang komunitas pendidikan tinggi di Indonesia, sebagai langkah awal pembentukan Komisi Pendidikan Tinggi KWI.

5. Daftar Bacaan

- [1] Sumardjo, H., 2020, “Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lembaga Pendidikan Katolik”, makalah tidak dipublikasikan, dibawakan dalam Webinar IKDKI, Ajaran Gereja tentang Pendidikan dan Konsekuensi Bagi Dosen Katolik, 14 Septembert 2020
- [2] 25 Tahun Wisma Sahabat Yesus, 2014, buku kenangan acara Perayaan 25 Tahun Wisma SY
- [3] Komisi Kerasulan Awam KWI, 2013, Modul Pendidikan Politik Umat Katolik
- [4] Komisi Kerasulan Awam KWI, 2006, Kaum Awam Katolik dan Keadaban Publik Bangsa